

VILLAGE FUND MANAGEMENT FOR INCREASING SOCIETY EMPOWERMENT IN SPECIAL AUTONOMOUS REGION IN PAPUA

Suryati Amar La Andi

Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Email: yati.suryati@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusulan program-program pemberdayaan sangat minim sekali. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya fungsi pengawasan dan pendampingan, kurangnya kecakapan/kualifikasi aparatur, minimnya perangkat teknologi, rendahnya inisiatif masyarakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu besarnya jumlah dana kampung yang diterima, usaha peningkatan program pemberdayaan sejalan dengan program prioritas Kabupaten Kaimana. Adanya dokumen-dokumen RKP kampung yang mencantumkan kegiatan pemberdayaan, dan struktur masyarakat yang homogen menjadi harapan bagi upaya peningkatan program pemberdayaan. Pemerintah kampung telah melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan sosialisasi, penyediaan perangkat teknologi secara swadaya, inisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Adapun rekomendasi yaitu dengan meningkatkan peran aktif Bamuskam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan. Selain itu, secara teknis perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk perangkat teknologi. Terakhir, pemerintah kabupaten harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur kampung melalui fungsi pendampingan dan pengawasan serta bimbingan teknis sehingga pengelolaan dana kampung berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kata kunci: dana kampung, pengelolaan, pemberdayaan, aparatur kampung

PENDAHULUAN

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga dengan demikian pembangunan daerah diupayakan sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat, menjamin perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka otonomi daerah diberikan kepada kota dan kabupaten dengan prinsip nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Indonesia terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Pemerintahan Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Tjahya Supriatna (2010:29) bahwa “Desa sebagai bagian integral menunjukkan adanya sumber-sumber kekuatan



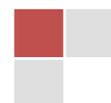
dan ketahanan bagi pemerintah nasional, lemah dan kuatnya, maju dan mundurnya, baik dan buruknya kondisi tatanan dan perkembangan pemerintah desa menunjukkan kondisi tatanan dan perkembangan pemerintah nasional dan sebaliknya”. Hal ini juga juga senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Sadu Wasistiono dan Tahir (2006:1) bahwa:

Kekuatan rantai besi terletak pada rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah dan desa maka desa merupakan rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi partautan terakhir masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi fokus utama dalam pembangunan. Mengingat pentingnya peran pemerintahan desa maka Pada tahun 2014 muncul kebijakan baru yang mengatur desa secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum untuk mengatur segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Undang-Undang Desa ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa. Merujuk pada undang-undang tersebut, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan.

TEORI

Menurut Sugiono “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. Dalam penelitian ini, fokusnya ditekankan pada terhadap pengelolaan dana kampung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat kampung. Dana kampung yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung. Pemerintahan Kampung harus melakukan pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Hal ini sejalan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardikanto dan Soebianto yang menyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses



dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri” seperti amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 mengamanatkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini juga serupa dengan amanat Peraturan Bupati Kaimana Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penggunaan dana kampung yang bersumber dari APBN digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggung jawab kampung yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan kampung.

METODE

Menurut Patilima bahwa “Desain sebuah penelitian dimulai dengan pemilihan topik, kemudian berturut-turut, metode-metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, dan format penulisan kualitatif. Secara singkat Nasution mengemukakan bahwa “desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Selanjutnya menurut Simangunsong “desain penelitian kualitatif bersifat sementara dan terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan”. Muri Yusuf mengatakan metode kualitatif adalah:

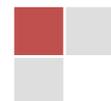
Suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Sedangkan metode deskriptif di jelaskan Nazir bahwa:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya menurut Moleong analisis data secara induktif digunakan karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataankenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. **Kedua**, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. **Ketiga**, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat



membuat keputusan lainnya. **Keempat**, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan -hubungan. **Kelima**, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

HASIL PENELITIAN

Kampung Coa memiliki 4 RT yaitu RT I, RT II, RT III dan RT IV. Secara administratif Kampung Coa berbatasan dengan Kampung Tanggaromi di sebelah utara, Kampung Trikora di sebelah selatan, Distrik Kambraw di sebelah barat, dan Kelurahan Krooy di sebelah timur. Topografi daerah Kampung Coa datar dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 2-4 meter. Kampung Coa memiliki 186 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk 721 orang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 412 orang dan jumlah penduduk perempuan 309 orang. Penduduk Kampung Coa paling banyak merupakan tamatan SMA/ sederajat. Penduduk Kampung Coa paling banyak menganut agama islam yakni sebesar 536 orang. Mata pencaharian penduduk di Kampung Coa sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan dan petani. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang ada di wilayah Kampung Coa di pinggir pantai. Secara lebih lanjut, jenis mata pencaharian penduduk di Kampung Coa dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Kampung Coa

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	157 Orang
PNS	31 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	12 Orang
Peternak	1 Orang
Nelayan	96 Orang
TNI/Polri	21 Orang
Pengusaha Kecil dan Menengah	12 Orang
Arsitektur	1 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	2 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	7 Orang
Bidan/Perawat Swasta	6 Orang
Pensiunan PNS/TNI/Polri	2 Orang

Sumber: diolah oleh peneliti, 2019

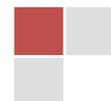
PENUTUP



Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pengelolaan dana kampung belum efektif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat karena dana kampung yang digunakan untuk pemberdayaan sangat sedikit. Dari Rp.823.604.000 dana kampung yang diterima oleh Kampung Coa hanya Rp. 70.990.000 yang digunakan untuk pemberdayaan yaitu sekitar 7,28% dan sisanya Rp. 736.141.000 digunakan untuk pelaksanaan pembangunan yaitu sebesar 92,72%. Terkait dengan seluruh proses pengelolaan dana kampung di Kampung Coa maka pada:
 - a. tahap perencanaan secara prosedural sudah berjalan dengan baik, namun secara kualitas program, masyarakat lebih banyak mengusulkan program pembangunan dibandingkan pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana kampung untuk pemberdayaan tidak optimal.
 - b. tahap pelaksanaan dinilai kurang baik dikarenakan pencairan dana kampung dilakukan tanpa adanya pengajuan laporan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya.
 - c. tahap penatausahaan di sekretariat kampung dinilai buruk dikarenakan belum adanya Buku Kas Umum.(BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. tahap pelaporan keuangan oleh kepala kampung belum baik karena tidak sesuai dengan prosedur pelaporan keuangan.
 - d. tahap pertanggungjawaban juga dinilai belum baik karena kampung tidak menyampaikan pertanggungjawabannya tiap tahunnya kepada masyarakat.
2. Terdapat faktor penghambat dan pendukung Proses pengelolaan dana kampung untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Coa:
 - a. Faktor penghambatnya antara lain tidak adanya fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan tidak berfungsinya pendampingan kampung. Sedangkan dari pengaruh internal seperti kurangnya kecakapan/ kualifikasi pendidikan aparatur kampung, kurangnya perangkat teknologi pendukung kegiatan,tidak adanya inisiatif masyarakat untuk pemberdayaan, dan komitmen untuk program berkelanjutan, serta rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah kampung.
 - b. Faktor pendukung ditinjau dari pengaruh eksternal antara lain: besarnya jumlah dana kampung yang dialokasikan untuk Kampung Coa (terbesar se-Kabupaten Kaimana) dan upaya peningkatan program pemberdayaan merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Kaimana. Sedangkan dari pengaruh internal nya seperti adanya dokumen RPK kampung yang mencantumkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan struktur masyarakat Kampung Coa yang homogen.

Terdapat Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Coa dalam mengatasi permasalahan yang muncul, antara lain dengan melakukan sosialisasi



tentang pentingnya program pemberdayaan, namun masih secara sporadis kepada masyarakat. Selain itu, untuk kelancaran kegiatan administrasi, perangkat kampung secara swadaya menyediakan perangkat teknologi seperti membawa laptop pribadi ke kantor. Perangkat kampung juga telah melakukan inisiatif untuk berkoordinasi langsung dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten jika mereka menemui kendala teknis dalam pengelolaan dana kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, NK. 1978. *Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Freddy, Rangkuti. 2014. *Teknik Membedah Kasus Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia
2004. *Metodologi Penelitian Remaja Rosda Karya*
- Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosda
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- M. Bryson, Jhon. 2008. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Patton, MQ. 1987. *How to use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publication, Inc
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Wasistiono. Sadu dan Irwan Thahir..2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yusuf, A. Muri.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Bupati Kaimana Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2017

C. JURNAL

- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. 2014. "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*".
Jurnal Administrasi Publik (JAP), hlm 597-602, Volume 2 No.4.
- Sulaiman, Zulkarnaen, dan Sudirman. 2013. "*Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nanga Jetak Kec.Dedai Kab. Sintang'*". Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, Vol 1, No 0001 (2013).

